

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan basis kehidupan masyarakat yang mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola penduduknya. Desa juga merupakan pelaksana Otonomi daerah tingkat terkecil di Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempatnya. Disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa diberikan sumber dana dan wewenang yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kegiatan pemerintahan desa memerlukan anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang dirancang oleh desa, oleh karena itu desa harus membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES). Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Terbentuknya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola desanya dalam rangka pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya (Hayat & Makhmudah, 2016). Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa desa pada tahun 2015 lalu telah mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), dimana dana tersebut tidak lagi melalui perantara tetapi dana tersebut akan langsung sampai pada rekening desa.

Kinerja keuangan merupakan hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi itu telah melakukan kegiatannya dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran/penilaian Kinerja keuangan pemerintahan Desa adalah suatu alat manajemen dalam meningkatkan kualitas dari pengambilan suatu keputusan dan Akuntabilitas (Ayu, 2018). Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis keuangan untuk menganalisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Desa. Analisis keuangan yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan berbeda dengan perhitungan analisis keuangan pada perusahaan swasta. Hasil dari analisis keuangan akan digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa dalam mengukur upaya pemerintah desa dalam menggali sumber pendapatan asli desa. Kinerja keuangan desa merupakan suatu pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan atau dapat dikatakan suatu prestasi yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Pemanfaatan dana yang tersedia dengan baik dan optimal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Terjadi pergeseran paradigma dalam hal kewenangan desa. Pemerintahan Pusat dan Daerah saat ini tidak lagi ikut andil secara langsung dalam kewenangan desa, tetapi masih memberikan pelatihan/pembelajaran, bimbingan, dan pedoman dalam hal pengaturan desa dan APB Desa (Hardiyati, 2018). APB Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk memberikan informasi terkait segala kegiatan dan aktifitas desa kepada

masyarakat desa atas pengelolaan dana di desa dan pelaksanaannya yang berupa rencana-rencana program kegiatan yang dibiayai dengan uang desa. Sulistiyoningtyas (2017) mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi diberbagai Daerah khususnya pada desa adalah tentang kontribusi dari pengalokasian Dana Desa untuk membiayai Belanja Desa itu lebih besar dari pada Kontribusi dari Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa.

Menurut Yabbar & Ardi (2015) APB Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Sedangkan komponen dari Belanja desa terdiri dari belanja di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga. Adanya APBDesa ini diharapkan Pemerintah Desa dapat mengelola dan mengalokasikan dananya untuk kebutuhan dan kepentingan desa secara efisien dan tepat sasaran. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain dari sumber pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa (Rochmah, 2015)

Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Pendapatan desa yang meningkat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam hal pelayanan kepada masyarakatnya. PADesa ini bersumber dari hasil usaha,swadaya, partisipasi, gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) dan Putri & Darmayanti (2019) menyatakan bahwa PAD yang dalam hal ini pada tingkat Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasin *et al.*(2017) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa.

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan desa yang berkontribusi sangat besar pada struktur APBDesa. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. Pendapatan transfer memiliki peranan yang cukup penting untuk mencapai efisiensi dalam penyediaan layanan bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan Budianto & Alexander(2016) dan Ayu (2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan yang dalam hal ini sama dengan dana atau pendapatan transfer tingkat daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hardiyati (2018) yang menyatakan bahwa Dana perimbangan atau dalam hal ini sama halnya dengan Pendapatan transfer tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pendapatan lain-lain merupakan komponen pendapatan yang bersumber dari selain PADesa dan pendapatan transfer. Pendapatan lain-lain memberikan peluang kepada desa untuk memperoleh pendapatan desa selain dari PADesa dan pendapatan transfer. Pendapatan lain-lain juga merupakan komponen penyumbang pendapatan desa yang berasal dari penerimaan hasil kerjasama, hibah, sumbangan pihak ketiga dan pendapatan lain-lain yang sah. jumlah dari pendapatan lain-lain digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Indriani & Sastradipraja (2014) dan Ardi *et al.*(2016) yang meneliti terkait pengaruh variabel pendapatan lain-lain terhadap kinerja keuangan ditingkat

pemerintah daerah, dengan menunjukan hasil bahwa pendapatan lain-lain tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun dalam penelitian ini akan meneliti pengaruh pendapatan lain-lain terhadap kinerja keuangan ditingkat pemerintahan desa. maka peneliti akan melakukan pengujian kembali terkait pengaruh pendapatan lain-lain terhadap kinerja keuangan ditingkat pemerintahan desa untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih akurat.

Belanja desa merupakan belanja yang diasumsikan akan membawa banyak pengaruh untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa (Yulihantini *et al.*, 2018). Belanja di desa meliputi belanja di berbagai bidang antara lain, belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Belanja desa membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Desa yang tidak dapat membiayai belanjanya akan di bantu dari pemerintah pusat dan daerah yang diterima desa sebagai bentuk pendapatan transfer. Penyerapan belanja desa yang baik akan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja keuangan desa.

Penelitian terdahulu terkait variabel belanja lebih dominan meneliti mengenai variabel belanja Modal, belanja rutin dan belanja pembangunan. Penelitian terdahulu rata-rata meneliti komponen belanja ditingkat pemerintah daerah. Penelitian oleh Andirfa *et al.* (2016), Astiti & Mimba (2016) dan Yulihantini *et al.* (2018) menunjukkan bahwa Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang juga dilakukan oleh Astiti & Mimba, (2016) dan Yulihantini *et al.* (2018) terkait belanja rutin, menunjukan hasil bahwa belanja rutin tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan untuk belanja pembangunan dalam penelitian Yasin *et al.* (2017) berpengaruh terhadap kinerja

keuangan. Penelitian ini akan berfokus pada 4 jenis belanja desa, yaitu Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, Belanja bidang pemberdayaan masyarakat.

Fenomena yang termuat dalam Jawa Pos.com (2018) menunjukkan bahwa inspektorat Kota Lamongan menemukan adanya kemoloran pada desa-desa dalam menetapkan APBDesa, sehingga adanya hal ini ditakutkan akan berdampak pada pelayanan masyarakat dan molornya kegiatan pembangunan. Pada tahun 2017, dari 462 desa yang ada di Lamongan masih ada lebih dari 25 desa yang belum menetapkan APBDesa. Sedangkan pada tahun 2018, terdapat 220 desa yang belum merampungkan APBDesanya (Mashuri, 2018). Rampungnya APBDesa merupakan salah satu syarat dalam pengajuan Dana desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD) yang dalam hal ini masuk kedalam komponen pendapatan transfer dan nilainya paling material dalam komponen APBDesa. Tanpa adanya rancangan APBDesa maka DD dan ADD tidak dapat dicairkan. Molornya penetapan APBDesa ini cenderung akan berdampak pada dugaan penyelewengan Dana Desa. Dana yang harusnya sudah bisa diserap di awal tahun, terpaksa belum bisa diserap karena APBDesa belum disahkan. Maka dalam hal ini ditakutkan APB Desa akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintahan desa di kabupaten Lamongan.

Maka berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti faktor dari struktur APBDesa yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Desa. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang terkait dengan kinerja keuangan pemerintah hanya berfokus pada tingkat pemerintahan daerah. Maka pada penelitian ini akan meneliti pada tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Kinerja Keuangan Desa”**. (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018-2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka dalam hal ini rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan ?
2. Apakah Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan ?
3. Apakah Pendapatan Lain-lain berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan ?
4. Apakah Belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan ?
5. Apakah Belanja di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan ?
6. Apakah Belanja di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan ?
7. Apakah Belanja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan ?
8. Apakah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Pendapatan Lain-lain, Belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja di Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, Belanja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa secara Simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Lamongan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui Pendapatan Lain-lain terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan.
4. Mengetahui Pengaruh Belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan.
5. Mengetahui Pengaruh Belanja di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan.
6. Mengetahui Pengaruh Belanja di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan.
7. Mengetahui Pengaruh Belanja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan.
8. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Pendapatan Lain-lain, Belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja di Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu dan sebagai tambahan literatur bagi civitas ekonomi, khususnya jurusan akuntansi dibidang sektor publik mengenai pengaruh dari struktur anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap kinerja keuangan desa.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan peneliti dalam bidang Pemerintahan Desa khususnya mengenai pengaruh struktur anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap kinerja keuangan Desa.

b. Bagi Bidang Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur-literatur akuntansi dibidang Akuntansi Sektor Publik mengenai pengaruh struktur anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap kinerja keuangan Desa.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan *feedback* untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Desa masing-masing.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan untuk mengetahui Pengaruh dari struktur anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap kinerja keuangan Desa.